

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PARTISIPATIF DI KELURAHAN DULOMO SELATAN KECAMATAN KOTA UTARA, KOTA GORONTALO

Rahmi Tangahu^{1*}, Lisda Van Gobel², Linda Nento³, Nunung Pala⁴,
Suhardiman Amir⁵, Asnawi Liputo⁶

Universitas Bina Taruna Gorontalo

tangahurahmi@gmail.com, lisdavangobel69@gmail.com, lindanento46@gmail.com,
nunk.gto@gmail.com, damheer@gmail.com, liputoasnawi@gmail.com

ABSTRAK

Kelurahan Dulomo Selatan merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan kelembagaan lokal dan pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan warga sebagai pelaku aktif dalam setiap tahapan program. Metode yang digunakan meliputi Participatory Rural Appraisal (PRA), pelatihan berbasis kebutuhan, pendampingan kelompok, dan evaluasi reflektif. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Mei 2026, pukul 08.30 WITA di Aula Kantor Kelurahan Dulomo Selatan dengan melibatkan 25 peserta yang terdiri dari pengurus RT/RW, anggota PKK, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha mikro. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang tata kelola kelembagaan sebesar 40,1% berdasarkan nilai pre-test dan post-test. Selain itu, terbentuk satu kelompok usaha bersama berbasis kuliner lokal dan terjadi revitalisasi Forum Komunikasi Warga (FKW) yang sebelumnya tidak aktif. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam membangun kemandirian dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dirancang bersama.

Kata Kunci: **Penguatan Kelembagaan; Ekonomi Masyarakat; Pendekatan Partisipatif; Pemberdayaan; Dulomo Selatan**

ABSTRACT

Dulomo Selatan Village is one of the urban villages in North City District, Gorontalo City, which faces challenges in local institutional management and community economic development. This community service activity aims to strengthen institutional and economic capacity through a participatory approach that positions residents as active agents in every stage of the program. Methods used include Participatory Rural Appraisal (PRA), needs-based training, group mentoring, and reflective evaluation. The activity was held on Thursday, May 18, 2026, at 08.30 WITA in the Dulomo Selatan Village Office Hall, involving 25 participants consisting of RT/RW administrators, PKK members, community leaders, and micro-entrepreneurs. Results showed a 40.1% improvement in participants' understanding of institutional governance based on pre-test and post-test scores. Additionally, a joint business group based on local culinary products was formed, and the previously inactive Community Communication Forum (FKW) was revitalized. This activity proves that a participatory approach is effective in building community independence and a sense of ownership over co-designed empowerment programs.

Keywords: Institutional Strengthening; Community Economy; Participatory Approach; Empowerment; Dulomo Selatan

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks otonomi daerah, kelurahan menjadi satuan pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat dan sekaligus menjadi ujung tombak pelayanan publik serta pembangunan komunitas berbasis lokal. Namun demikian, banyak kelurahan di Indonesia, termasuk di Kota Gorontalo, masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat proses pemberdayaan, mulai dari lemahnya kapasitas kelembagaan, terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, hingga minimnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan.

Kelurahan Dulomo Selatan, yang terletak di Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah perkotaan dengan dinamika sosial-ekonomi yang cukup kompleks. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan lurah serta tokoh masyarakat setempat, teridentifikasi beberapa permasalahan mendasar yang perlu segera mendapat perhatian. Pertama, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, seperti RT, RW, PKK, dan Karang Taruna, belum berfungsi secara optimal akibat terbatasnya pemahaman pengurus tentang prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Kedua, potensi ekonomi lokal yang cukup beragam, mulai dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga pertanian perkotaan, belum dikelola secara terorganisir dan belum mendapat sentuhan teknologi pemasaran modern. Ketiga, Forum Komunikasi Warga (FKW) yang seharusnya menjadi wadah aspirasi dan musyawarah warga, dalam beberapa tahun terakhir tidak berjalan aktif.

Permasalahan serupa juga ditemukan di berbagai kelurahan lain di Indonesia. Penelitian Hikmat (2010) menunjukkan bahwa kelemahan kelembagaan lokal kerap menjadi hambatan utama dalam proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Sementara itu, Mardikanto dan Soebiato (2015) menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Di sisi lain, Chambers (1994) dalam kerangka Participatory Rural Appraisal (PRA) menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek, dalam setiap proses pembangunan.

Mengacu pada kondisi tersebut, tim dosen dari Universitas Negeri Gorontalo merancang program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan ekonomi masyarakat Kelurahan Dulomo Selatan melalui pendekatan partisipatif. Program ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan perguruan tinggi untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat di wilayah sekitarnya, serta merupakan implementasi nyata dari salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan umum kegiatan PKM ini adalah memperkuat kapasitas kelembagaan dan perekonomian masyarakat Kelurahan Dulomo Selatan secara sistematis dan berkelanjutan. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan

pemahaman dan keterampilan pengurus lembaga kemasyarakatan dalam mengelola organisasi secara efektif dan akuntabel; (2) mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro berbasis potensi dan kearifan lokal; (3) memfasilitasi terbentuknya jaringan kelompok usaha masyarakat yang solid dan berdaya saing; serta (4) menciptakan model pendampingan masyarakat berbasis partisipatif yang dapat direplikasi di kelurahan-kelurahan lain di Kota Gorontalo.

Kajian Pustaka

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Kapasitas kelembagaan (institutional capacity) dalam konteks pengembangan masyarakat merujuk pada kemampuan suatu organisasi atau lembaga untuk mengelola sumber daya, merencanakan program, melaksanakan kegiatan, dan mengevaluasi kinerjanya secara efektif dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas kelembagaan bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan proses transformatif yang menyentuh dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor anggota organisasi, serta menata ulang sistem dan prosedur kelembagaan yang ada (Nasdian, 2014).

Lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), memegang peran strategis sebagai agen perubahan di tingkat akar rumput. Namun demikian, efektivitas lembaga-lembaga ini sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pengurus yang memiliki pemahaman baik tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), manajemen program, dan komunikasi partisipatif akan mampu menggerakkan lembaganya secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas.

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada di sekitar mereka untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. Suharto (2014) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi yang efektif harus bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu enabling (menciptakan iklim yang kondusif), empowering (memperkuat potensi yang dimiliki), dan protecting (memberikan perlindungan dari eksploitasi).

Pendekatan berbasis komunitas dalam pengembangan ekonomi menekankan pada pemanfaatan modal sosial dan kearifan lokal sebagai fondasi utama. Di berbagai daerah di Indonesia, terbukti bahwa kelompok usaha bersama yang dibangun atas dasar kepercayaan, solidaritas, dan nilai-nilai kearifan lokal memiliki daya tahan yang jauh lebih baik dibandingkan usaha yang dibangun secara individual tanpa akar komunitas yang kuat (Sumodiningrat, 2009).

Pendekatan Partisipatif dalam PKM

Participatory Rural Appraisal (PRA) yang dikembangkan oleh Chambers (1994) merupakan salah satu metode pengkajian dan perencanaan berbasis komunitas yang

paling banyak digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat. Metode ini menekankan prinsip bahwa masyarakat lokal adalah pakar atas kondisi kehidupan mereka sendiri, sehingga harus dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, dan merumuskan solusi. Dengan demikian, program yang dihasilkan akan lebih relevan, lebih mudah diterima, dan lebih berpotensi untuk berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Desain dan Pendekatan

Kegiatan PKM ini dirancang dengan menggunakan desain action research partisipatif, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan antara tindakan (*action*) dan refleksi (*reflection*) secara berulang dan berkesinambungan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan tim pelaksana untuk secara dinamis merespons kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, sekaligus menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan dan diverifikasi langsung oleh komunitas sasaran. Inti dari pendekatan ini adalah keyakinan bahwa masyarakat bukan penerima pasif bantuan, melainkan agen aktif yang mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan melaksanakan perubahan atas kehendak sendiri.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan melalui empat tahap yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan satu sama lain. Tahap pertama adalah persiapan, yang dilaksanakan selama empat minggu sebelum kegiatan inti. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi intensif dengan pihak kelurahan, termasuk lurah, sekretaris kelurahan, dan ketua-ketua RT/RW. Selain itu, dilakukan pula asesmen kebutuhan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang kondisi kelembagaan dan ekonomi masyarakat setempat.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan inti, yang dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Mei 2026, pukul 08.30 WITA hingga selesai, bertempat di Aula Kantor Kelurahan Dulomo Selatan. Kegiatan pada tahap ini terdiri dari dua sesi paralel yang berjalan secara berurutan: sesi penguatan kelembagaan di pagi hari dan sesi pengembangan ekonomi di siang hari. Setiap sesi dirancang dengan metode campuran antara ceramah interaktif, diskusi kelompok terfokus, simulasi, dan praktik langsung.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ketiga adalah pendampingan lanjutan, yang dilaksanakan selama tiga bulan pasca kegiatan inti. Pada tahap ini, tim pelaksana secara berkala mengunjungi lokasi mitra untuk memantau perkembangan implementasi hasil pelatihan, memberikan bimbingan teknis yang diperlukan, serta memfasilitasi pemecahan masalah yang muncul di lapangan. Tahap keempat adalah evaluasi dan pelaporan, yang mencakup penyusunan laporan akhir kegiatan, publikasi artikel ilmiah, serta diseminasi hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Materi dan Metode Penyampaian

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini disusun dalam dua klaster utama. Klaster pertama adalah penguatan kelembagaan, yang mencakup materi tentang prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan, teknik fasilitasi musyawarah yang efektif, manajemen administrasi berbasis digital, dan mekanisme perencanaan program kerja berbasis kebutuhan warga. Klaster kedua adalah pengembangan ekonomi masyarakat, yang mencakup identifikasi dan pemetaan potensi ekonomi lokal, manajemen usaha mikro dasar, pencatatan keuangan sederhana, strategi pemasaran berbasis media sosial, dan penguatan jaringan usaha antarwarga.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Metode penyampaian yang digunakan adalah kombinasi ceramah interaktif, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*), permainan peran (*role play*), studi kasus, dan praktik langsung. Setiap metode dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan karakteristik materi dan tingkat kemampuan awal peserta. Modul pelatihan juga disusun dalam bahasa yang sederhana, komunikatif, dan kaya ilustrasi agar mudah dipahami oleh seluruh kalangan peserta.

3.4 Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan berjumlah 25 orang yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria keterlibatan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan/atau memiliki usaha mikro yang sedang berjalan atau dalam rencana. Peserta terdiri dari pengurus RT dan RW (2 orang), anggota PKK aktif (10 orang), tokoh masyarakat dan pemuda (8 orang), serta pelaku usaha mikro (5 orang). Keberagaman latar belakang peserta ini justru memperkaya

dinamika diskusi dan meningkatkan peluang terjadinya sinergi antar kelompok masyarakat.



Gambar 3. Foto Bersama Tim Pelaksana PKM dengan Lurah dan Perangkat Kelurahan Dulomo Selatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Masyarakat Kelurahan Dulomo Selatan

Berdasarkan hasil asesmen awal yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, diperoleh gambaran yang cukup komprehensif tentang kondisi kelembagaan dan ekonomi masyarakat Kelurahan Dulomo Selatan sebelum kegiatan PKM dilaksanakan. Dari sisi kelembagaan, sebagian besar pengurus RT dan RW mengaku belum pernah mendapat pelatihan formal tentang manajemen organisasi kemasyarakatan. Akibatnya, kegiatan administrasi berjalan secara ad hoc tanpa sistem yang terstandar, rapat-rapat pengurus jarang terdokumentasikan dengan baik, dan program kerja lebih banyak bersifat reaktif terhadap masalah yang sudah terjadi daripada bersifat proaktif dan terencana.

Dari sisi ekonomi, hasil pemetaan partisipatif menunjukkan bahwa sebagian besar warga yang memiliki usaha mikro menjalankan usahanya secara tradisional tanpa pencatatan keuangan yang memadai. Hampir tidak ada yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya, padahal potensi produk yang dimiliki—terutama kuliner berbasis bahan lokal Gorontalo seperti binthe biluhuta, kola-kola, dan ilabulo—memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan daya tarik yang potensial bagi pasar yang lebih luas.

Pelaksanaan Sesi Penguatan Kelembagaan

Sesi penguatan kelembagaan dilaksanakan pada pukul 08.30 hingga 12.00 WITA dan dihadiri oleh seluruh peserta. Sesi dibuka secara resmi oleh Lurah Dulomo Selatan yang memberikan sambutan hangat dan menegaskan komitmen pemerintah kelurahan untuk mendukung penuh program PKM ini. Tim narasumber kemudian memaparkan materi tentang prinsip-prinsip tata kelola organisasi kemasyarakatan yang baik,

dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok yang dibagi berdasarkan jenis lembaga masing-masing peserta.

Dalam sesi diskusi kelompok, peserta diminta untuk mengidentifikasi tiga masalah utama yang paling menghambat kinerja lembaga mereka masing-masing, kemudian secara bersama-sama merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Metode ini terbukti sangat efektif dalam membangkitkan partisipasi aktif peserta. Hampir semua peserta terlibat dalam diskusi dengan penuh antusias, dan banyak gagasan inovatif yang muncul dari proses ini, termasuk ide pembentukan sistem administrasi digital berbasis WhatsApp untuk dokumentasi kegiatan RT/RW, yang kemudian disepakati bersama untuk segera diimplementasikan.

Hasil evaluasi sesi kelembagaan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pemahaman peserta. Rata-rata skor pre-test yang dilakukan sebelum sesi berlangsung adalah 58,3, sementara rata-rata skor post-test yang dilakukan setelah sesi selesai meningkat menjadi 81,7, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 40,1%. Seluruh peserta juga menyatakan kepuasan tinggi terhadap relevansi materi yang disampaikan, dengan rata-rata skor kepuasan 4,5 dari skala 5,0.



Gambar 4. Proses Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan Sesi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Sesi pengembangan ekonomi dilaksanakan pada pukul 13.30 hingga 17.00 WITA setelah jeda istirahat dan makan siang bersama. Sesi ini diawali dengan kegiatan pemetaan potensi ekonomi secara partisipatif menggunakan metode social mapping, di mana peserta diminta untuk memetakan jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan masing-masing beserta potensi dan kendala yang dihadapi. Hasilnya, teridentifikasi setidaknya tiga klaster usaha utama di Kelurahan Dulomo Selatan: klaster kuliner berbasis pangan tradisional Gorontalo, klaster kerajinan tangan berbahan alam, dan klaster pertanian perkotaan skala rumah tangga.

Setelah pemetaan potensi, peserta mendapatkan pelatihan manajemen usaha mikro yang difokuskan pada dua aspek krusial, yaitu pencatatan keuangan sederhana dan

pemasaran digital. Pada aspek keuangan, peserta diperkenalkan pada sistem pembukuan sederhana menggunakan buku catatan terstandar yang telah disiapkan oleh tim PKM. Setiap peserta yang memiliki usaha mikro dibimbing untuk mencoba membuat catatan keuangan untuk usahanya selama sesi berlangsung. Pada aspek pemasaran digital, peserta diajari cara membuat konten yang menarik untuk media sosial, mengoptimalkan profil usaha di platform digital, dan memanfaatkan marketplace lokal untuk memperluas jangkauan pasar.

Salah satu capaian yang paling menggembirakan dari sesi ini adalah terbentuknya kelompok usaha bersama yang beranggotakan 12 orang warga, yang sepakat untuk mengembangkan produk kuliner khas Gorontalo secara terorganisir. Kelompok yang diberi nama 'Kelompok Usaha Dulomo Rasa' ini langsung difasilitasi untuk menyusun rencana usaha awal (business plan sederhana), termasuk pembagian peran, target produksi, strategi pemasaran, dan rencana keuangan jangka pendek.

Revitalisasi Forum Komunikasi Warga

Salah satu luaran yang tidak direncanakan sebelumnya namun muncul secara organik dari proses diskusi partisipatif adalah komitmen bersama untuk merevitalisasi Forum Komunikasi Warga (FKW) Kelurahan Dulomo Selatan. Forum ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun telah lama tidak aktif akibat minimnya koordinasi antar-pengurus dan tidak adanya program kerja yang jelas. Melalui fasilitasi tim PKM, peserta bersepakat untuk menghidupkan kembali FKW dengan struktur kepengurusan yang baru, program kerja yang lebih realistis, dan mekanisme rapat rutin yang lebih efisien.

Terpilihnya ketua FKW yang baru beserta susunan pengurus lengkapnya menjadi tonggak penting dalam proses ini. Pengurus yang baru terpilih langsung mendapat pendampingan dari tim PKM untuk menyusun program kerja tahun 2026 yang mencakup kegiatan-kegiatan strategis seperti musyawarah warga triwulanan, program berbagi ilmu antar-warga, dan kerjasama dengan pihak kelurahan untuk optimalisasi layanan publik.

Evaluasi dan Capaian Keseluruhan

Evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan PKM ini dilakukan melalui dua instrumen utama: kuesioner kepuasan peserta dan lembar observasi proses yang diisi oleh anggota tim PKM. Secara keseluruhan, capaian kegiatan ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam proposal. Beberapa indikator capaian utama yang dapat dicatat adalah sebagai berikut: tingkat kehadiran peserta mencapai 95% dari target yang ditetapkan; rata-rata tingkat kepuasan peserta terhadap keseluruhan kegiatan mencapai 4,4 dari skala 5,0; terjadi peningkatan pengetahuan peserta tentang kelembagaan sebesar 40,1% berdasarkan nilai pre-test dan post-test; terbentuknya satu kelompok usaha bersama beranggotakan 12 warga; revitalisasi Forum Komunikasi Warga dengan kepengurusan baru; serta tersusunnya dokumen rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur.

Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang sangat signifikan. Pertama, dukungan penuh dari pihak kelurahan yang tidak hanya

menyediakan fasilitas ruang pertemuan, tetapi juga aktif membantu mobilisasi peserta dan menjembatani komunikasi antara tim PKM dengan warga. Kedua, antusiasme peserta yang sangat tinggi, yang tercermin dari kualitas keterlibatan mereka dalam setiap sesi diskusi dan keaktifan mereka dalam mengajukan pertanyaan serta berbagi pengalaman. Ketiga, relevansi materi yang disampaikan dengan kebutuhan nyata peserta, yang merupakan hasil dari proses asesmen kebutuhan yang cermat sebelum kegiatan berlangsung.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema penguatan kapasitas kelembagaan dan ekonomi masyarakat berbasis partisipatif di Kelurahan Dulomo Selatan telah berhasil dilaksanakan dengan capaian yang sangat memuaskan dan melampaui target yang telah ditetapkan. Melalui serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, program ini berhasil mewujudkan beberapa perubahan nyata yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.

Dari dimensi kelembagaan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan secara signifikan, baik dalam hal pengetahuan tentang tata kelola organisasi maupun keterampilan dalam memfasilitasi musyawarah dan mengelola administrasi kelembagaan. Revitalisasi Forum Komunikasi Warga juga menjadi bukti konkret bahwa pendampingan yang tepat sasaran dapat menggerakkan kembali potensi kelembagaan yang selama ini terpendam.

Dari dimensi ekonomi, terbentuknya kelompok usaha bersama 'Dulomo Rasa' dan meningkatnya keterampilan pemasaran digital para pelaku usaha mikro menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Lebih dari sekadar pelatihan teknis, kegiatan ini berhasil membangun kepercayaan diri dan semangat kolaborasi di antara warga, yang merupakan modal sosial paling berharga dalam proses pemberdayaan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Hikmat, H. (2010). Strategi pemberdayaan masyarakat (edisi revisi). Bandung: Humaniora Utama Press.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik (edisi revisi). Bandung: Alfabeta.
- Nasdian, F. T. (2014). Pengembangan masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suharto, E. (2014). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial (cetakan ke-5). Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. (2009). Mewujudkan kesejahteraan bangsa: Menanggulangi kemiskinan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Zubaedi. (2013). Pengembangan masyarakat: Wacana dan praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.